

**Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance*
Terhadap Kemungkinan Terjadinya *Corporate Failure*
pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

WAHYU SETYAWATI UTAMI
NIM. 12030110130206

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Wahyu Setyawati Utami

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110130206

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KEMUNGKINAN TERJADINYA
CORPORATE FAILURE PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
LISTING DI BEI**

Dosen Pembimbing : Dr. Indira Januarti, M.Si.,Akt

Semarang, 4 Maret 2014
Dosen Pembimbing,

Dr. Indira Januarti, M.Si.,Akt
NIP. 19640101 199202 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Wahyu Setyawati Utami
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110130206
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KEMUNGKINAN TERJADINYA
CORPORATE FAILURE PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
LISTING DI BEI**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Maret 2014

Tim Penguji:

1. Dr. Indira Januarti, M.Si.,Akt (.....)
2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si.,Akt (.....)
3. Wahyu Meiranto, S.E,M.Si,Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Wahyu Setyawati Utami, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Praktik *Corporate Governance* Terhadap Kemungkinan Terjadinya *Corporate Failure* pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan / atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

Wahyu Setyawati Utami
NIM. 12030110130206

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

Masalah dan solusi jaraknya hanya sejauh dahi dan tempat sujud
Tidak ada bahu untuk bersandar
Masih ada lantai untuk bersujud
(@hijabsyarie)

I just like being my self
Always positive and just be strong

Dalam hidup ini tidak ada yang bisa diandalkan kecuali dirimu sendiri

Youth has no age

I was smiling yesterday
I am smiling today
And...
I will always smile

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orang tua tercinta.
- Keluarga besar Eyang Soemartono dan Kusman Sumardjo

ABSTRACT

This study aims to analyze and provide empirical evidence the effect of corporate governance characteristics like outside directors, outside ownership, audit opinion, remuneration of boards member, independent audit committee, and board size on probability of corporate failure.

The population in this study consists of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. Observation period was 2011-2012. Data was collected by using a purposive sampling method. The total number of samples is 147 companies, consist of 57 failed companies and 90 non-failed companies. The research data were analyzed with logistic regression.

The empirical result of this study show that outside ownership and audit opinion are significantly affect the probability of corporate failure. While outside directors, remuneration of boards member, independent audit committee, and board size has no effect on probability of corporate failure.

Keyword: *corporate governance characteristics, probability of corporate failure, logistic regression*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* yang terdiri dari komisaris independen, *outsider ownership*, opini auditor, remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi, komite audit independen, dan ukuran dewan direksi terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Data dikumpulkan menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel dalam penelitian ini adalah 147 perusahaan, terdiri dari 57 *failed companies* dan 90 *non-failed companies*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *outsider ownership* dan opini auditor berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Sedangkan komisaris independen, remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi, komite audit independen, dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

Kata kunci: Karakteristik *corporate governance*, kemungkinan terjadinya *corporate failure*, regresi logistik

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Pengaruh Praktik *Corporate Governance* Terhadap Kemungkinan Terjadinya *Corporate Failure* pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI dengan lancar dan tepat waktu, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Indira Januarti.MSi.Akt selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabarannya telah memberikan arahan dan waktu yang diluangkan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
4. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. selaku dosen wali.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan dan Tata Usaha, atas bantuannya dalam kelancaran penulis selama proses menuntut ilmu di kampus.
7. Orang tua tercinta, Bapak Try Moertono Handayanto dan Ibu Eling Setiati dan Kakak Wahyu Budi Utomo beserta istrinya Nuning, dan dea keponakan paling lucu sedunia, terimakasih atas doa yang dipanjatkan, serta dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
8. Devi Indriyani *my collegemate*, sahabat suka dan duka, terimakasih untuk motivasi dan *sharing* selama ini, dan sahabat-sahabat terbaikku *para moi*: Raras, Nunung, Norma, Vita, Lies, Nanda, Ifa, Winda, terimakasih atas semangat dan dukungan serta kekeluargaan yang tiada terkira, semoga kita terus seperti keluarga.
9. *My very-bestfirend*, Alima Shofia, terimakasih untuk kasih sayang, waktu, *support*, dan semangat yang diberikan.
10. Sahabat terbaik di Akuntansi 2010 : Gyna, Nadia, Rani, Anitya, Dea, Melisa, Andi, *mbahe* Hisyam, Kanida, Manggar, Niken, Risa, Atun, Ica Cirebon, Ica Bogor, Yulia, dan teman-teman seperjuangan di Akuntansi Undip 2010 : Randy, Fian Sapi, Seno, Nikho, Cukong Rino, Arya, Gres, Nyak. Begitu juga teman satu dosen bimbingan Enny dan Shelly. *Semangat dan sukses untuk kita semua!*

11. Keluarga besar KSPM FEB Undip dan IMA SC Undip, terimakasih atas pelajaran hidup yang telah diberikan.
12. Mirani, yang sudah bersedia meminjamkan buku SPSS dan *Auditing* sehingga memperlancar proses pembuatan skripsi ini.
13. Keluarga besar Akuntansi Undip R1 2010, terimakasih untuk proses belajar bersama-sama yang memberikan arti, semoga kita semua sukses dan dapat menjaga silaturahmi sampai kapanpun.
14. Mbak Mona, senior Akuntansi Undip 2009 terimakasih atas bimbingan singkatnya.
15. Semua teman-teman yang menunggu saya selesai sidang skripsi, yang memberi dukungan secara langsung serta seluruh pihak yang mendukung dan memberikan doa melalui sms, BBM, twitter dan path.
16. Teman-teman KKN Desa Wonotenggang, Kecamatan Rowosari, Kendal : Lupita, Anggi, Medina, Alex, Lukman, Ragil
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 4 Maret 2014

Wahyu Setyawati Utami

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 <i>Corporate Failure</i>	14
2.1.2.1 Pengertian <i>Corporate Failure</i>	14
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	16
2.1.3.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i>	16
2.1.4 Karakteristik <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.4.1 Proporsi dewan komisaris	20

2.1.4.2 <i>Outsider Ownership</i>	25
2.1.4.3 Opini Audit.....	25
2.1.4.4 Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.....	26
2.1.4.5 Komite Audit	27
2.1.4.6 Ukuran Dewan Direksi.....	28
2.1.5 Penelitian Terdahulu.....	30
2.2 Kerangka Pemikiran	33
2.3 Pengembangan Hipotesis	34
2.3.1 Komisaris Independen dan <i>Corporate Failure</i>	34
2.3.2 <i>Outside Ownership</i> dan <i>Corporate Failure</i>	35
2.3.3 Opini Audit dan <i>Corporate Failure</i>	37
2.3.4 Remunerasi Dewan Komisaris dan <i>Corporate Failure</i>	37
2.3.5 Komite Audit Independen dan <i>Corporate Failure</i>	39
2.3.6 Ukuran Dewan Direksi dan <i>Corporate Failure</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	42
3.1.1 Variabel Dependen	42
3.1.2 Variabel Independen	42
3.1.2.1 Komisaris Independen	43
3.1.2.2 <i>Outside Ownership</i>	43
3.1.2.3 Opini Audit	43
3.1.2.4 Remunerasi Dewan Komisaris.....	44
3.1.2.5 Komite Audit.....	45
3.1.2.6 Ukuran Dewan Direksi	46
3.2 Populasi dan Sampel.....	46
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5 Metode Analisis Data.....	47
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
3.5.2 Uji Hipotesis	48
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	52

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	52
4.2 Analisis Data	53
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	51
4.2.2 Analisis Regesi Logistik	55
4.2.2.1 Uji <i>Hosmer and Lemeshow's</i>	58
4.2.2.2 <i>Overall Fit Model</i>	58
4.2.2.3 <i>Nagelkerke R Square</i>	59
4.2.2.4 Pengujian Hipotesis	59
4.3 Interpretasi Hasil	63
4.3.1 Hipotesis 1	63
4.3.2 Hipotesis 2	64
4.3.3 Hipotesis 3	65
4.3.4 Hipotesis 4	66
4.3.5 Hipotesis 5	67
4.3.6 Hipotesis 6	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	70
5.3 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	30
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	52
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 1	51
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 2.....	56
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif 3.....	57
Tabel 4.5 <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	58
Tabel 4.6 <i>Overall Fit Model</i>	59
Tabel 4.7 Hasil pengujian <i>Nagelkerke R Square</i>	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis	60
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	63

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	33
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A Data Perusahaan Sampel	76
Lampiran B Hasil Tabulasi Data	81
Lampiran C Hasil Statistik Deskriptif	87
Lampiran D Hasil Output SPSS	89
Lampiran E Presentase Perusahaan yang Memiliki Remunerasi di atas Rata-rata	93
Lampiran F Presentase Perusahaan yang Memiliki Komite Audit Independen 3 Orang	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Corporate governance merupakan komponen yang penting untuk mempertahankan kinerja perusahaan. Konsep tata kelola perusahaan ini mutlak diperlukan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, menurut Lakshan dan Wijekoon (2012) *corporate governance* merujuk pada suatu peraturan, prosedur dan administrasi perusahaan kaitannya dengan *shareholder*, kreditur, karyawan, supplier, dan pemerintah.

Corporate governance sangat penting diaplikasikan untuk menghindari praktik-praktik curang dari manajemen perusahaan. Pada masa lampau banyak terjadi kecurangan bisnis sebagai akibat tidak diterapkannya *corporate governance* dengan baik, sehingga memiliki dampak buruk kepada *shareholder*, kreditur, karyawan, supplier, dan bahkan efek ini sampai mengenai stabilitas pemerintahan (Lakshan dan Wijekoon, 2012).

Perkembangan *corporate governance* tidak jauh dari skandal mendunia yang dilakukan oleh Enron, WorldCom, HealthSouth dan ArthurAnderson, dimana menurut Lakshan dan Wijekoon (2012) peran dari *corporate governance* pada perusahaan yang gagal (*corporate failure*) ini diabaikan. Isu *corporate governance* ini juga sedang mengemuka di Indonesia, apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998. Belum adanya konsep tata kelola yang baik

dianggap sebagai penyebab runtuhnya perusahaan-perusahaan di masa krisis tersebut. Adanya konsentrasi kepemilikan dan kepengurusan perusahaan pada keluarga atau kelompok keluarga di Indonesia menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dan juga kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik sangat lemah (Sastriana, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Lakshan dan Wijekoon (2012) menyatakan bahwa dalam perusahaan yang gagal mengindikasikan kurangnya konsistensi kebijakan, prosedur pengendalian, pedoman dan mekanisme untuk menjamin akuntabilitas dan kewajiban fidusia. Lemahnya *corporate governance* dapat meningkatkan probabilitas terjadinya *corporate failure* sekalipun untuk perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik.

Suatu perusahaan dapat dikategorikan mengalami *corporate failure* jika perusahaan mengalami mengalami defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih negatif dan/atau mengalami *debt default* dalam satu periode pelaporan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *corporate failure* sangat beragam. Beberapa ekonom menghubungkan fenomena ini dengan tingkat bunga yang tinggi, tekanan resesi keuntungan, beban hutang yang berat. Selain itu, karakteristik spesifik industri, seperti peraturan pemerintah dan jenis operasi perusahaan dapat berkontribusi sebagai sebab terjadinya kegagalan perusahaan (Charitou *et al.*, 2004).

Biaya ekonomi yang ditimbulkan akibat kegagalan bisnis relatif cukup besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Warner (1977), menunjukkan bahwa nilai pasar dari suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*distress*) menurun secara substansial. Kesulitan keuangan merupakan salah satu indikator terjadinya *corporate failure*. Oleh sebab itu, penyedia modal, investor dan kreditor, disamping manajemen dan karyawan perusahaan memiliki tanggung jawab dan konsekuensi yang sama dalam hal terjadinya *corporate failure*. Auditor yang juga merupakan pihak eksternal akan menghadapi ancaman tuntutan jika gagal menangkap sinyal-sinyal peringatan atas terjadinya kegagalan perusahaan melalui opini yang diberikannya (Jones, 1987 dan Boritz, 1991).

Tindakan pencegahan dan faktor-faktor penyebab *corporate failure* perlu diidentifikasi sejak dini. Banyak penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui penyebab terjadinya *corporate failure*. Penelitian ini sudah dilakukan sejak lama, namun dengan sampel dan variabel berbeda. Penelitian ini mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* yang dihubungkan dengan terjadinya *corporate failure* di Indonesia.

Corporate governance merupakan pedoman yang harus diikuti oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, penggunaan karakteristik-karakteristik *corporate governance* sebagai prediktor atas kemungkinan terjadinya *corporate failure* dapat berguna sebagai tindakan preventif.

Penerapan *corporate governance* harus dilaksanakan semua pihak tak terkecuali oleh dewan komisaris atau manajer puncak perusahaan. Secara hukum,

pengelolaan perusahaan dipegang oleh dewan komisaris yang bertugas melayani kepentingan perusahaan di atas kepentingan mereka sendiri dan manajemen perusahaan. Untuk itu, perlu adanya komisaris independen yang netral dan tidak memihak siapapun dalam perusahaan. Menurut Wagner (1998), dewan komisaris yang didominasi oleh komisaris independen akan jauh lebih baik untuk mewujudkan efektivitas manajerial dan akan mengurangi probabilitas terjadinya *corporate failure*.

Adanya pemegang saham independen memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Peningkatan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham independen akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pengawasan manajemen, sehingga tidak akan terjadi *financial fraud* yang dapat memicu terjadinya *corporate failure*. Keberadaan pemegang saham ini dapat menekan manajemen agar tidak berlaku hanya untuk kepentingan pribadinya, sehingga kecurangan bisa diminimalisir.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan. Komite audit adalah sub-komite pada dewan komisaris yang memberikan komunikasi formal antara dewan komisaris, sebagai pengawas internal, dengan auditor eksternal. Dengan adanya komite audit ini dapat menjauhkan konflik kepentingan antara dewan komisaris, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan *corporate governance* yang lain termasuk perhatian terhadap jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan dewan direksi. Sesuai penerapan *corporate governance* yang baik, pembayaran untuk dewan

komisaris tidak boleh berlebihan dan harus dibatasi. Remunerasi ini ditentukan berdasarkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Main *et al.* (1996) menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan antara total remunerasi dewan direksi dengan kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan laporan keuangan yang baik akan menjauhkan perusahaan dari opini modifikasi. Opini audit memberikan informasi keuangan dan kualitas manajerial pada perusahaan. Dengan demikian, opini audit bisa digunakan sebagai indikator kemungkinan terjadinya kegagalan perusahaan. Penerimaan selain opini *unqualified* muncul terkait dengan sisi negatif status perusahaan. Secara empiris, berbagai penelitian membuktikan kekuatan dari pendapat audit, bukti tersebut mendukung hubungan antara opini audit dan terjadinya kesulitan keuangan. Altman dan McGough (1974) dan Menon dan Schwartz (1986) menemukan bahwa sekitar 50 persen dari sampel mereka menerima opini *going concern* sebelum kesulitan keuangan tersebut benar-benar terjadi.

Penerapan yang lain dari *corporate governance* adalah jumlah dewan direksi. Ukuran ini menentukan kualitas pengendalian dan pengawasan manajerial. Menurut Jensen (1993), suatu dewan direksi yang baik setidaknya harus terdiri dari tujuh atau delapan anggota. Jumlah tersebut dinilai sudah efektif, sehingga dewan direksi dapat menjalankan fungsinya secara efisien dan dengan begitu akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian ini mencoba mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Lakshan dan Wijekoon pada tahun 2012. Namun demikian, terdapat perbedaan

dalam hal penentuan kriteria pengukuran *corporate failure*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terjadinya defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih negatif dan/atau mengalami *debt default* dalam satu periode pelaporan. Penelitian ini juga memberikan objek penelitian yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa saham Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel *CEO Duality* karena variabel tersebut tidak bisa diterapkan pada *One-Tier system* yang digunakan Indonesia.

Perbedaan lainnya adalah indikator variabel komite audit, dimana dalam penelitian ini menggunakan komite audit independen, karena keberadaan komite audit dalam perusahaan saat ini sudah diwajibkan, sehingga penggunaan variabel dummy untuk komite audit sudah tidak relevan jika dijadikan sebagai ukuran yang dapat mempengaruhi terjadinya *corporate failure* pada perusahaan. Selain itu, variabel remunerasi dewan komisaris merupakan hal yang masih jarang digunakan sebagai variabel independen dalam melakukan penelitian mengenai kegagalan perusahaan di Indonesia. Melalui penelitian ini akan diuji pengaruh jumlah komisaris independen, pemegang saham independen (*outside ownership*), opini audit, remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi, komite audit dan ukuran dewan komisaris sebagai proksi karakteristik *corporate governance* terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan untuk meneliti penyebab *corporate failure* adalah rasio keuangan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Beaver (1966), dimana dia menyimpulkan bahwa bahwa *rasio*

working capital funds flow/total asset dan *net income/total assets* merupakan indikator yang baik dan mampu membedakan perusahaan yang akan pailit dengan yang tidak pailit secara tepat masing-masing sebesar 90% dan 88% dari sampel yang digunakan.

Dua tahun berikutnya Altman (1968) juga melakukan penelitian yang sama dan menghasilkan model dengan 7 rasio keuangan. Dalam penelitiannya, Altman menggunakan sampel 33 perusahaan pailit yang dipasangkan dengan 33 perusahaan tidak pailit dan hasilnya secara tepat mampu mengidentifikasi 90% kasus kepailitan pada satu tahun sebelum kepailitan terjadi.

Penelitian ini tidak menggunakan rasio keuangan melainkan menggunakan variabel *corporate governace* dalam mengidentifikasi terjadinya *corporate failure*. Dimana model *corporate governace* dinilai lebih merefleksikan kondisi yang sebenarnya pada perusahaan. Penelitian dengan topik kebangkrutan/kepailitan perusahaan terus dilakukan oleh para peneliti, perkembangan terakhir penelitian dengan topik kebangkrutan atau kepailitan terletak pada alat uji statistiknya (Hadad *et al.*, 2003). Keterbatasan informasi akuntansi seringkali mengalami proses *window dressing* sebagai bagian dari manajemen pendapatan, sedangkan struktur *corporate governance* lebih mendekati kondisi yang sebenarnya. Jadi *corporate failure* lebih bisa diprediksi apabila informasi akuntansi dilengkapi dengan variabel-variabel *corporate governance* (Bodroastuti, 2009).

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
2. Apakah *outside ownership* memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
3. Apakah opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
4. Apakah remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
5. Apakah keberadaan komite audit independen memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?
6. Apakah ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *outsider ownership* terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia.

3. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh komite audit independen terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh jumlah dewan direksi terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh dari karakteristik *corporate governance* terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana bagi manajemen perusahaan untuk menerapkan *corporate governance* agar terhindar dari kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, dimana tiap – tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Sistematika untuk mempermudah penulisan dan pembahasan sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan, yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, baik secara teoritis dan atau fakta secara pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan. Rumusan masalah yang menjelaskan tentang fenomena yang perlu dipecahkan melalui suatu penelitian.. Bagian tujuan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai. Bagian manfaat penelitian diungkapkan secara khusus manfaat dari hasil penelitian tersebut. Sistematika penulisan mencakup uraian ringkas dari materi pada setiap bab yang akan dibahas.

Bab dua menjelaskan tentang telaah pustaka yang berisi landasan teori yang berisi penjabaran mengenai teori – teori yang mendukung perumusan hipotesis dan diuraikan secara sistematis tentang hasil – hasil penelitian terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Kerangka pemikiran berisi penjelasan tentang permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang akan disimpulkan dari telaah pustaka serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab tiga berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Bagian ini berisi variabel operasional dan definisi operasional dari variabel – variabel dalam penelitian yang selanjutnya harus didefinisikan

secara operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

Bab empat akan dibahas tentang hasil dan analisis. Uraian deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan ringkasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan dalam penelitian, dan saran yang merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori utama yang berhubungan dengan konsep *corporate governance* adalah teori agensi (*agency theory*). Teori ini muncul terkait hubungan antara prinsipal dan manajemen perusahaan, karena dalam *corporate governance* yang baik, hubungan kedua pihak tersebut menjadi sorotan utama. Posisi keduanya tidak dapat dilepaskan dari operasional perusahaan, baik prinsipal maupun agen memiliki kedudukan dan peran yang sama pentingnya, keduanya memiliki *bargaining position* yang secara normatif dan empiris juga mempunyai karakteristik: *moral hazard*, *bounded rationality*, dan *risk averse* atau *opportunistic* (modul Lembaga Komisararis dan Direktur Indonesia, 2006). Keduanya akan berusaha untuk menguntungkan diri sendiri

Prinsipal membutuhkan informasi dari agen untuk memantau kondisi perusahaan, sedangkan agen membutuhkan dana dan otoritas lebih untuk menjalankan operasional perusahaan. Dalam teori ini, prinsipal sebagai pihak yang memberi wewenang dan manajer adalah agen yang menerima wewenang. Pemberian wewenang oleh prinsipal ini dimaksudkan agar manajemen bisa lebih fleksibel dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada perusahaan, namun terkadang wewenang yang diberikan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Hal yang disoroti dalam teori agensi ini adalah adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal perusahaan terdiri dari investor, kreditor, dan

masyarakat. Prinsipal sebagai pemilik sumber daya menginginkan agar agen dapat mengolah sumber daya sebaik-baiknya untuk kepentingan prinsipal itu sendiri. Prinsipal adalah penyedia modal, sedangkan agen atau manajemen adalah pengelola yang memanfaatkan modal tersebut. Prinsipal secara langsung ataupun tidak langsung akan menekan manajemen agar bisa menghasilkan keuntungan. Bila manajemen dapat melaksanakan apa yang menjadi tuntutan prinsipal, maka ia akan mendapat bonus yang cukup.

Disisi lain, pihak manajemen berusaha mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus bertanggung jawab kepada prinsipal. Posisi manajemen dalam perusahaan bisa dikatakan lebih kuat karena adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*), dimana manajemen memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Keuntungan itulah yang dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengelabui pihak prinsipal. Oleh karena itu, hubungan yang baik sukar tercipta karena adanya benturan kepentingan dari dua pihak tersebut.

Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang yang memiliki rasionalitas ekonomi, dimana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi oleh kepentingan pribadi atau akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kepentingan orang lain. Teori keagenan menyatakan sulit untuk memercayai bahwa manajemen (*agent*) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*), sehingga diperlukan *monitoring* dari pemegang saham (Copeland dan Weston,1992).

Monitoring dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini harus orang yang netral dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan selalu ada konflik kepentingan (Brigham dan Gapenski,1996) antara (1) Manajer dan pemilik perusahaan (2) Manajer dan bawahannya, (3) Pemilik perusahaan dan kreditor. Pihak ketiga dihadirkan untuk menjadi penengah dan pemantau atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan tersebut. Pengawasan oleh pihak independen harus dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Penyelewengan wewenang yang dilakukan pihak manajemen sebagai agen perusahaan bisa membawa perusahaan ke arah kegagalan. Terjadinya *corporate failure* bisa disebabkan karena agen yang berlaku curang untuk kepentingannya pribadi. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai sarana *monitoring* hubungan prinsipal dan agen serta untuk membatasi perilaku para pemangku kepentingan adalah dengan penerapan *corporate governance*.

2.1.2 Corporate Failure

2.1.2.1 Pengertian Corporate Failure

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Banyak perusahaan yang melakukan pinjaman kepada pihak ketiga agar operasional bisnisnya tetap bisa berjalan. Seiring berjalannya waktu, ada banyak faktor yang membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban untuk melakukan pengembalian pinjamannya. Kegagalan perusahaan dalam

mengembalikan pinjamannya dapat dikategorikan bahwa perusahaan mengalami *corporate failure*.

Corporate failure atau kegagalan perusahaan mengacu pada kondisi defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih negatif dan/atau *debt default* yang dialami oleh suatu perusahaan dalam satu periode pelaporan. *Corporate failure* dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi, politik dan sosial dunia global serta terjadinya bencana alam. Namun, fokus pada penelitian ini adalah faktor internal perusahaan yaitu dari aspek sumber daya manusia, manajemen perusahaan, dan struktur organisasi di dalam perusahaan. Jika terjadi *corporate failure* yang diakibatkan oleh faktor internal ini maka sistem dan susunan tersebut harus dirubah untuk perbaikan kinerja yang lebih baik. Perombakan susunan organisasi dalam perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja perusahaan misalnya perubahan komposisi dewan komisaris, komposisi kepemilikan, dan perubahan struktur operasional lainnya.

Antisipasi *corporate failure* dilakukan dengan restrukturisasi sistem yang salah satunya dengan penerapan *corporate governance*. Segala komponen dalam bisnis perusahaan dirombak sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip *corporate governance* yang baik. Perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam bisnis yang dijalankan perusahaan.

2.1.3 *Corporate Governance*

2.1.3.1 *Pengertian Corporate Governance*

Perkembangan *corporate governance* begitu pesat karena terpuruknya kondisi perusahaan akibat terjadinya *corporate failure* atau kegagalan bisnis, praktek bisnis yang tidak baik, kurangnya suatu *disclosure* dan tidak adanya transparansi, serta manajemen yang tidak efisien dan masalah-masalah sosial perusahaan (Al-Momani dan Moghli, 2012). Setelah banyak skandal yang terjadi dalam dunia bisnis, kini bagaimana mengembangkan konsep *corporate governance* menjadi salah satu agenda utama dalam dunia bisnis di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Definisi mengenai *corporate governance* belum bisa dijabarkan secara tepat, namun beberapa definisi yang telah diberikan oleh orang-orang yang kompeten dapat membantu kita untuk memahami bagaimana konsep *corporate governance*.

World Bank mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“ ... is a system of structuring, operating and controlling a company with a view to achieve long-term strategic goals to satisfy shareholders, creditors, employees, customers and suppliers, and complying with the legal and regulatory requirements, apart from meeting environmental and local community needs...”

[“...merupakan sistem strukturisasi, operasional, dan pengendalian suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan strategik jangka panjang untuk memberi keuntungan bagi pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan dan supplier, dan menyetujui persyaratan legal, terpisah dari segi lingkungan dan kebutuhan komunitas lokal...”]

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) juga memiliki versi sendiri mengenai definisi *corporate governance*, yaitu sebagai suatu sistem yang diarahkan dan dikendalikan oleh perusahaan

bisnis. Struktur *corporate governance* dalam perusahaan dapat menentukan suatu hak dan kewajiban yang berbeda antar pemangku kepentingan pada perusahaan seperti : anggota dewan, manager, pemegang saham dan pihak-pihak lainnya; dan memberikan arahan mengenai aturan dan prosedur dalam pembuatan keputusan dalam hal urusan perusahaan. Pelaksanaan *corporate governance* dapat memberikan suatu mekanisme melalui tujuan perusahaan yang telah disusun lalu bagaimana cara pencapaian tujuan tersebut diikuti dengan pengawasan kinerja yang baik.

Beberapa peneliti lain mendefinisikan *corporate governance* sebagai pengatur hubungan antara pemangku kepentingan (Kaur dan Mishra, 2010). Namun dari yang telah dijabarkan oleh World Bank dan OECD, pada intinya *corporate governance* merujuk pada istilah yang telah diterima secara universal. Kaufman and Englander (2005) menyatakan bahwa *governance* dapat dideskripsikan sebagai tim, sumber daya (Mayer, 2006), perusahaan (Monks dan Minnow, 2003), kebijakan (Clarkham, 1998; dan Griffiths dan Zammuto, 2005), pasar (Witherell, 2002; and Sasseen and Weber, 2006) dan bangsa (Macdonald, 2000; and Griffiths dan Zammunto, 2005) penggunaan keserbaragaman perspektif teoritis (Mallin, 2004). Cheffins (1999) menyatakan *corporate governance* tidak mendominasi satu subyek area, namun *corporate governance* memiliki implikasi untuk hukum, keuangan dan akuntansi, kegiatan bisnis, dan lainnya.

Penerapan *corporate governance* yang baik dapat diindikasikan melalui pelaksanaan prinsip-prinsip *corporate governace*. Perusahaan harus bisa memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada setiap aspek bisnis

perusahaan. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang terdapat pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006), yaitu :

1. *Transparency* (keterbukaan)

Perusahaan harus mampu menyediakan informasi material dan relevan kepada pihak yang berkepentingan. Informasi yang disajikan harus akurat dan tepat waktu karena informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip keterbukaan ini tidak lantas menjadikan perusahaan kehilangan haknya untuk menjaga rahasia perusahaan, karena informasi yang dipublikasikan terbatas pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemangku kepentingan. Pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara benar, oleh karena itu akuntabilitas merupakan prasyarat utama yang diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan. Perusahaan harus memiliki pengendalian internal serta memastikan semua karyawannya memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dan dalam pelaksanaannya setiap karyawan harus berpedoman pada etika bisnis yang disepakati.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Perusahaan melaksanakan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Independency* (kemandirian)

Untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus dikelola secara mandiri atau independen untuk menghindari campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Masing-masing organ perusahaan tidak boleh saling mendominasi dan memastikan diri tidak memiliki benturan kepentingan, sehingga pengambilan keputusan bisa subyektif terbebas dari tekanan pihak manapun.

5. *Fairness* (kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Selain itu, perusahaan harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama antara pemangku kepentingan dan karyawan serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Mekanisme pelaksanaan konsep *corporate governance* selain berpusat pada kepentingan pemilik perusahaan juga sebagai pengakomodasi kepentingan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Dengan adanya *corporate governance* akan membatasi perilaku para pengurus perusahaan agar bertindak sesuai dengan kapasitasnya dalam perusahaan.

2.1.4 Karakteristik *Corporate Governance*

Pemilihan karakteristik elemen *corporate governance* sebagai variabel independen karena elemen-elemen tersebut mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kondisi perusahaan. Karakteristik yang digunakan untuk pengukuran *corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Komisaris independen
2. *Outsider ownership*
3. Opini audit
4. Remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi
5. Komite audit independen
6. Ukuran dewan direksi

2.1.4.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris perusahaan merupakan suatu dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam wikipedia Indonesia, dewan komisaris adalah suatu dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk dalam RUPS dan di atur UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Sistem *corporate governance* di Indonesia menggunakan sistem *two-tier*, yaitu pemisahan peran antara dewan komisaris dan dewan direksi pada perusahaan. Pemisahaan ini memberi kejelasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing antara dewan komisaris dan dewan direksi. Jadi pada sistem *two-*

tier ini, dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja dewan direksi. Namun secara lebih luas, tugas dewan komisaris tidak sekedar pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, tetapi masih ada tugas-tugas penting yang perlu dilakukan oleh komisaris. Menurut Patrick (2001) dalam modul yang diterbitkan oleh Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2006) mendefinisikan enam tugas dari dewan komisaris, yaitu :

1. *Anticipation*

Dalam kondisi dan metode apapun, dewan komisaris harus mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada perusahaan. Untuk melakukan antisipasi yang baik, maka dewan komisaris harus bisa membangun visi dan misi perusahaan yang tepat.

Banyak dewan komisaris yang tidak mampu menjalankan tugas antisipasi ini yang kemudian menjadi tidak berdaya saat menghadapi kondisi perusahaan yang memburuk. Disinilah perlu diatur komposisi anggota komisaris yang ideal, khususnya anggota dewan yang berasal dari luar (*outsider director*) atau komisaris independen. Anggota komisaris independen dipilih sesuai keunggulan dibidangnya masing-masing agar mampu melakukan penelitian di industri dimana perusahaan berada.

Namun pada sistem *two-tier*, dewan komisaris tidak bisa secara langsung terlibat dalam operasi perusahaan, akibatnya para komisaris tidak begitu menjiwai apa yang terkandung dalam visi, misi, dan strategi. Sebagai contoh adalah kasus kolapsnya Enron, terbukti bahwa dewan komisaris gagal dalam memonitor. Power Report menyimpulkan bahwa

boards Enron dapat dan harus disalahkan karena gagal meminta informasi dan gagal memeriksa dan memahami informasi yang tidak disampaikan kepada mereka. Hal ini menunjukkan kegagalan *boards* dari Enron untuk mengantisipasi kejadian masa depan.

2. *Advocacy*

Advokasi merupakan dukungan perorangan dari anggota dewan komisaris yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Anggota dewan bisa mempengaruhi persepsi tentang perusahaan, pengetahuan dan edukasi masyarakat, dan pemahaman tentang bisnis perusahaan. Dengan cara ini, maka dewan tidak saja memberikan dukungan emosional dan intelektual tetapi juga dukungan berbentuk manajemen keuangan dan kebijakan investasi.

3. *Autonomy*

Anggota dewan harus memberikan hak otonomi kepada CEO untuk melaksanakan tugasnya menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dengan diberikannya otonomi, maka CEO diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan dengan baik. Oleh karena dari itu, seorang CEO akan berusaha untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Tanpa adanya kebebasan yang CEO dapatkan, maka kinerjanya tidak akan maksimal dan dapat memberikan efek frustrasi. *Negative feeling* dan rasa tidak percaya diri dari seorang CEO dapat memengaruhi kinerja perusahaan ke arah yang tidak baik.

4. *Accountability*

Dewan komisaris harus bisa memastikan pemberian otonomi kepada eksekutif harus dibarengi dengan jaminan terlaksananya akuntabilitas oleh eksekutif tersebut. Untuk mengawasi agar eksekutif melaksanakan akuntabilitasnya, maka dewan komisaris membentuk beberapa komite, seperti komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Namun, pembentukan komite tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara keduanya, disinilah peranan dewan komisaris untuk meredakan ketegangan dan menjadi penengah antara komite dan eksekutif.

5. *Advice*

Dewan komisaris perusahaan beranggotakan orang-orang yang mempunyai keahlian, kemampuan, dan keahlian dibeberapa bidang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan advis pada manajemen dalam rangka mengoperasikan perusahaan secara efisien dan efektif. Seharusnya, anggota dewan perusahaan terdiri dari orang-orang dengan berbagai latar belakang, khususnya meliputi keuangan, akuntansi, industri dimana perusahaan berada, dan politik.

6. *Assistance*

Tugas dewan komisaris tidak hanya memberikan nasihat, tetapi anggota dewan perusahaan harus mampu memberikan pengarahan (*assist*) kepada eksekutif perusahaan. Arahan untuk para eksekutif perusahaan sangat penting, karena eksekutif harus merealisasikan strategi perusahaan

dan mereka memerlukan arahan dewan komisaris agar betul-betul menuju tujuan yang diinginkan yaitu memenangkan kompetisi pasar.

Dalam komposisi susunan keanggotaan dewan komisaris perusahaan perlu adanya anggota komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepengurusan ataupun hubungan keluarga dengan anggota komisaris maupun pengurus perusahaan lainnya atau hubungan dalam hal apapun yang dapat memengaruhi independensinya. Dewan komisaris independen memiliki peran yang sama pentingnya dengan anggota dewan komisaris lainnya. Dalam konsep sistem *two-tier* seperti di Indonesia, kehadiran dewan komisaris independen sangat diperlukan untuk mengurangi sifat *oportunistic* dari manajemen perusahaan agar tidak terjadi *moral hazard* dan *asymetri information*. Keberadaan dewan komisaris indepenen telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia nomor IA Kep-305/BEJ/07-2004 tentang pencatatan saham dan efek yang menyatakan bahwa jumlah minimum komisaris independen adalah 30% dari jajaran dewan komisaris yang dipilih.

Komisaris independen tidak boleh memihak siapapun, karena itu dalam jabatannya, seorang komisaris independen bisa memberikan pandangan alternatif mengenai suatu masalah dalam perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miller (1990), ketidakmampuan perusahaan dalam bereaksi untuk menanggapi permasalahan merupakan penyebab utama terjadinya kemerosotan perusahaan. Hal itu dikarenakan perusahaan dengan jumlah komisaris independen yang lebih sedikit akan mengalami kesulitan untuk merespon perubahan lingkungan eksternal perusahaan, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan lebih besar. Maka

dari itu, keanggotaan dewan komisaris perusahaan dengan komposisi komisaris independen yang lebih banyak akan lebih unggul dalam hal efektifitas manajerial dan akan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan.

2.1.4.2. *Outsider Ownership*

Kepemilikan saham dari bukan pengelola perusahaan yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan publik akan memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui pengawasan yang efektif. Bukti menunjukkan bahwa peningkatan substansial dari kepemilikan saham oleh *outsider* menghasilkan insentif yang besar dalam hal pengawasan manajemen (Jensen, 1993) dan mengurangi kemungkinan terjadinya *financial fraud* (Beaver, 1996).

2.1.4.3 Opini Audit

Opini audit dapat memberikan informasi tentang keuangan yang menunjukkan kualitas kinerja keuangan dan kualitas manajerial yang menunjukkan kinerja manajemen dari suatu perusahaan. Dengan demikian opini audit dapat digunakan sebagai salah satu indikator dari kemungkinan terjadinya kegagalan perusahaan.

Menurut standar profesional akuntan publik SA Seksi 110, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Auditor dapat memberikan opini positif atau opini negatif. Opini positif diberikan jika laporan keuangan menunjukkan kualitas yang baik yaitu dengan opini wajar tanpa pengecualian atau *unqualified opinion*. Sebaliknya, jika auditor meragukan kualitas laporan keuangan perusahaan maka ia akan memberikan opini modifikasi. Opini modifikasi terdiri dari opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat.

Menurut SPA 705, terdapat ketentuan mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan auditor melakukan modifikasi terhadap suatu opini. Auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika:

- a. Auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

2.1.4.4 Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Isu remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi erat kaitannya dengan isu *corporate governance*. *Corporate governance* yang baik semestinya akan ada pembayaran yang lebih untuk dewan komisaris dan dewan direksi dimana besarnya remunerasi tersebut terutama ditentukan oleh kinerja perusahaan (Lakshan dan Wijekoon, 2012).

Dewan komisaris dan direksi harus bekerja keras untuk mewujudkan konsep tata kelola perusahaan yang baik. Remunerasi diberikan sebagai upah atas

pencapaian dewan komisaris dan dewan direksi dalam memenuhi sasaran dan tujuan perusahaan. Standar remunerasi akan berbeda tiap perusahaan dan besarnya jumlah remunerasi ditentukan dalam rapat umum pemegang saham perusahaan.

2.1.4.5 Komite Audit

Komite audit adalah sub-komite dari dewan komisaris yang memberikan komunikasi formal antara dewan komisaris, pengawas internal, dan auditor eksternal (Lakshan dan Wijekoon, 2012). Dapat dikatakan bahwa komite audit merupakan jembatan penghubung antara perusahaan dan pihak-pihak eksternal yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan untuk melindungi para pemangku kepentingan perusahaan.

Tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Keberadaannya menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit dipertegas dengan keputusan Bapepam dalam SE BAPEPAM no. 3 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit dan keanggotaan komite audit independen berdasarkan ketentuan Bapepam LK no. KEP-643/BL/2012 tgl. 7 Desember 2012, yaitu bahwa komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar dari emiten atau perusahaan publik (www.komiteaudit.org).

2.1.4.6 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dari suatu dewan direksi dapat menentukan kualitas dari pengawasan dan pengendalian manajemen dalam perusahaan. Dewan direksi perusahaan memiliki pengaruh cukup besar dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat, maka komposisi jumlah dewan direksi harus diperhatikan. Keanggotaan dewan direksi terdiri atas beberapa direktur dan dipimpin oleh seseorang sebagai direktur utama atau CEO (*chief executive officer*).

Direksi bertugas dan bertanggungjawab untuk mengelola perusahaan. Setiap anggota direksi mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Dalam Pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006) agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khususnya untuk komposisi direksi, pedoman pokok pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- 1.1. Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
- 1.2. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 1.3. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 1.4. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu mengenai penyebab terjadinya *corporate failure* yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Metodologi	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Beaver (1966)	<i>Univariate Discriminant Analysis</i>	rasio-rasio keuangan sebagai berikut : <i>cash flow/total debt, current assets/current liabilities, net income/total assets, total debt/total asset, working capital/total assets. Financial distressed</i>	Rasio <i>working capital funds flow/total asset</i> dan <i>net income/total assets</i> mampu membedakan perusahaan <i>failed</i> dengan yang <i>non-failed</i> secara tepat masing-masing sebesar 90% dan 88% dari sampel yang digunakan.
Altman (1968)	<i>Multivariate dicriminant analysis</i>	Rasio keuangan yang digunakan Altman (1968) adalah <i>Current Assets/current Liabilities, Market Value of Equity/Book Value of Debt, Net Sales/Total Asset, Operating Income/Total Asset, EBIT/Total Interest Payments, Retained Earnings/Total Assets, Working Capital/Total Assets, Working Capital/total Assetes, Retained Earnings/Total Assetes, Earnings Before Ineters and taxes/total</i>	Seluruh model penelitian yang dilakukan merupakan prediktor yang tepat dalam memprediksi kebangkrutan dengan persentase 94% tepat diklasifikasikan untuk membedakan perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut.

		<i>assets, market value equity/book value of total debt, sales/total sales.</i>	
Hong (1983)	<i>Logit analysis</i>	<i>Firm's intangible asset</i> : perbedaan nilai perusahaan; opini <i>going concern</i> ; dan <i>value in liquidation</i> , klasifikasi industri, ukuran, dan <i>level of free assets</i> perusahaan	<i>Intangible asset</i> dan ukuran perusahaan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kesuksesan reorganisasi perusahaan <i>Free assets</i> perusahaan secara statistik signifikan dan berpengaruh positif terhadap kesuksesan reorganisasi perusahaan
LoPucki (1983)	<i>Exploratory study</i>	Jenis industri perusahaan, ukuran perusahaan, usia perusahaan, <i>creditor opposition</i> , dan lokasi geografis	Perusahaan manufaktur secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan perusahaan Lokasi geografis bukan merupakan variabel <i>exploratory</i> yang signifikan
Charitou et al. (2000)	<i>Logit model</i>	<i>Cash flow from operations to total liabilities, earnings to total liabilities, total liabilities to total assets, corporate failure</i>	Arus kas dan profitabilitas berhubungan negatif dengan kemungkinan terjadinya kegagalan <i>Financial leverage</i> berhubungan positif terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan
Sulaiman et al. (2001)	<i>Logit Analyssis</i>	Rasio profitabilitas, rasio <i>leverage</i> , rasio likuiditas, dan rasio efisiensi, <i>corporate failure</i>	<i>Debt ratio, interest coverage</i> dan <i>total assets turnover</i> sebagai prediktor dari kemungkinan terjadinya kegagalan
Lakhsan dan Wijekoon (2012)	<i>Logistic regression</i>	Karakteristik <i>corporate governanve</i> : komisaris independen; <i>outside ownership</i> ; opini audit, komite audit; remunerasi dewan	komisaris independen, komite audit dan remunerasi dewan komisaris berhubungan negatif dengan kemungkinan terjadinya

		komisaris; ukuran dewan direksi; <i>corporate failure</i>	<i>corporate failure outside ownership</i> , opini audit, dan ukuran dewan direksi bukan variabel yang signifikan
--	--	---	---

Sumber : berbagai jurnal

Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan yaitu struktur *corporate governance*. Variabel-variabel yang termasuk karakteristik *corporate governance* tersebut diduga mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya *corporate failure*.

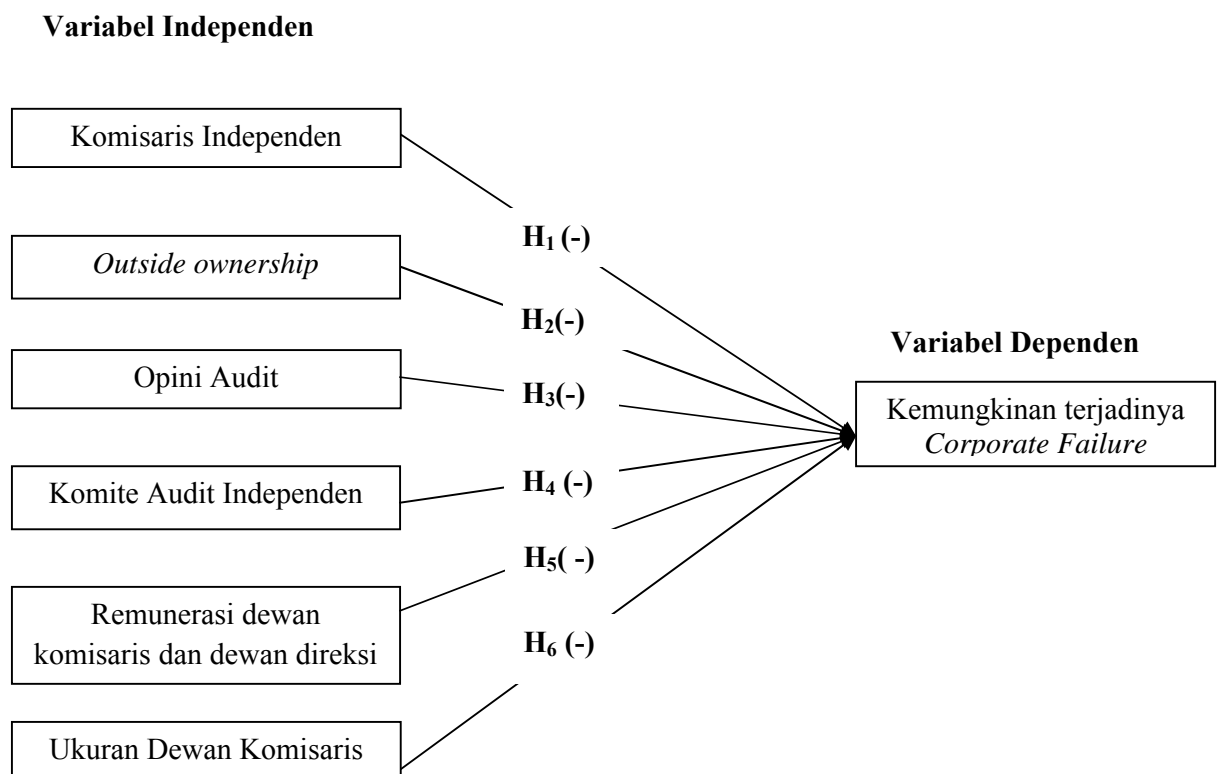
2.2 Kerangka Pemikiran

Terjadinya *corporate failure* bisa dicegah dengan tindakan preventif. Antisipasi perlu diterapkan sejak dini, salah satu upaya untuk mengurangi probabilitas terjadinya *corporate failure* adalah diterapkannya suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Konsep struktur *corporate governance* dilaksanakan sebagai pencegahan agar perusahaan tidak mengalami suatu kegagalan atas bisnis yang dijalankannya. Perusahaan dapat dikatakan mengalami kegagalan atau disebut *corporate failure* jika perusahaan yang mengalami defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih negatif dan/atau mengalami *debt default* dalam satu periode pelaporan.

Pada penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan yaitu struktur *corporate governance*, yang terdiri dari: proporsi komisaris independen; *outsider ownership*; opini audit; remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi; komite audit independen; dan ukuran dewan direksi; yang dijadikan sebagai variabel independen. Untuk memberikan gambaran, dibuat sebuah bagan yang

menggambarkan hubungan antar variabel-variabel yang diturunkan dari hipotesis. Gambar yang menunjukkan hubungan antar variabel sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Bagan di atas merupakan hasil visualisasi hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Terdapat 6 variabel yang mengarah pada variabel *corporate failure* sebagai variabel dependen. Penelitian ini mengacu pada penelitian Lakshan dan Wijekoon (2012), dimana dalam penelitian sekarang ini tidak menggunakan variabel *CEO duality*, karena di Indonesia tidak menerapkan struktur *CEO duality*.

Selain itu, sesuai dengan UU Pasar Modal, dimana tiap perusahaan wajib untuk memiliki komite audit, maka pengukuran variabel komite audit tidak lagi diukur dengan ada tidaknya komite audit tetapi diganti dengan jumlah anggota komite audit independen dalam keanggotaan komite audit perusahaan. Pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Komisaris Independen dan *Corporate Failure*

Komisaris independen dianggap sebagai pihak yang netral dan tidak memihak siapapun di dalam perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat meyakinkan pemangku kepentingan terhadap kinerja manajemen perusahaan, karena mereka menilai bahwa *inside director* kurang obyektif dan tidak independen (Hambrick dan D' Aveni, 1992).

Dalam perspektif keagenan, kemampuan dewan komisaris dalam mekanisme pengawasan yang efektif tergantung pada independensinya terhadap manajemen (Beasley, 1996). Independensi dewan komisaris ini terlihat dari proses kerjanya berdasarkan kepentingan perusahaan. Komisaris independen dapat bertindak mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan pengarahan

kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan dengan tata kelola yang baik atau *good corporate governance* (Fama dan Jensen, 1983).

Keanggotaan dewan komisaris yang didominasi oleh pihak-pihak dari luar perusahaan dapat meningkatkan independensi dari anggota dewan komisaris. Teori agensi menyatakan semakin tinggi proporsi komisaris independen maka pengawasan kepada manajemen perusahaan juga semakin ketat. Seorang komisaris independen harus mampu menolak pengaruh buruk dan segala bentuk intervensi pihak manajemen sehingga kebijakan dan keputusannya dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan perusahaan.

Proporsi komisaris independen berhubungan negatif dengan kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Semakin besar prosentase dewan komisaris independen, maka akan meminimalkan kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hambrick dan D'Aveni (1992), mereka menemukan bahwa perusahaan yang gagal memiliki jumlah komisaris yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan pasangannya yaitu perusahaan yang bertahan. Sejauh ini hasil penemuan tersebut telah dikonfirmasi juga oleh Wagner, Stimpert, dan Fubara (1998).

Wagner *et al.*, (1998) menguji hubungan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang besar akan berpengaruh pada kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan kinerja yang lebih baik akan memperkecil potensi kebangkrutan dan meminimalkan terjadinya kegagalan.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

2.3.2 *Outside Ownership* dan *Corporate Failure*

Persebaran konsentrasi kepemilikan perusahaan akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen perusahaan. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan (Wardhani, 2006). *Outside Ownership* dalam penelitian ini merupakan gabungan dari kepemilikan institusi dan kepemilikan publik.

Pada teori agensi, pemisahan fungsi pengelolaan dengan kepemilikan perusahaan dapat meminimalkan kecurangan sebagai akibat dari benturan kepentingan yang dimiliki. Jumlah kepemilikan saham oleh pihak independen yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dapat mengurangi potensi kegagalan perusahaan.

Kepemilikan oleh institusi dan kepemilikan publik dapat meningkatkan kekuatan fungsi *monitoring*, karena pihak independen sebagai pemegang saham tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan sehari-hari maka agar tidak dirugikan, pemegang saham akan mengawasi kinerja manajer dengan ketat sehingga manajer lebih berhati-hati dan tidak ceroboh dalam bertindak, terutama dalam hal pengambilan keputusan utang agar terhindar dari resiko gagal bayar.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2004) dan Nur'aeni (2010), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Jika kinerjanya baik maka perusahaan akan terhindar dari kemungkinan terjadinya kegagalan.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Outside ownership* berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

2.3.3 Opini Audit dan *Corporate Failure*

Opini audit mencerminkan kondisi kewajaran laporan keuangan dan kondisi manajerial yang berguna sebagai suatu sinyal mengenai kondisi perusahaan. Pada situasi tertentu, auditor dapat menerbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian, tetapi dengan kata-kata yang berlainan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Laporan tersebut adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan (Arens *et al.*, 2008)

Opini audit dapat digunakan sebagai indikator terjadinya kegagalan dalam perusahaan. Opini modifikasi yang dinyatakan oleh auditor ada hubungannya dengan sisi negatif status perusahaan (Lakshan dan Wijekoon, 2012). Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Wu dan Wu (2005) menunjukkan hasil bahwa perusahaan dengan hasil audit yang negatif akan meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk mengalami *financial distress*. Altman dan McGough (1974) dan Menon dan Schwartz (1986) menemukan bahwa sekitar 50% dari sampelnya menerima opini *going concern* sebelum *distress* benar-benar terjadi.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Opini audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

2.3.4 Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan *Corporate Failure*

Remunerasi harus merefleksikan pengalaman dan tingkat tanggungjawab dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Bila kinerja perusahaan menunjukkan suatu peningkatan maka remunerasi juga akan meningkat. Besarnya remunerasi ini sangat tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Perusahaan harus memberikan remunerasi yang memadai kepada dewan komisaris agar fungsi-fungsi dewan komisaris dapat berjalan dengan semestinya.

Dalam teori keagenan, untuk mendapatkan remunerasi yang besar, dewan komisaris bisa saja melakukan penekanan terhadap pihak perusahaan. Adam Smith pernah meramalkan bahwa akan selalu ada kelalaian dan pelimpahan dalam pengelolaan perusahaan karena pihak direksi mengelola uang pihak lain. Hal ini adalah dasar dalam teori agensi modern (Copp, 2011). Secara sederhana, pihak dewan komisaris dianggap bertindak rasional dan maka dari itu akan tergoda untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, terutama jika mereka tidak puas terhadap remunerasi yang dibayarkan.

Remunerasi berkaitan erat dengan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Lakhsan dan Wijekoon (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang gagal, membayar dewan komisarisnya lebih rendah daripada perusahaan yang tidak gagal. Penelitian yang dilakukannya menunjukkan adanya hubungan

negatif dan signifikan antara remunerasi dengan status *corporate failure*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa jika perusahaan membayar dewan komisaris dan dewan direksi dengan jumlah yang rendah maka akan memicu terjadinya kegagalan perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki motivasi untuk memajukan kinerja perusahaan karena rendahnya upah yang diterima.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Remunerasi dewan komisaris independen dan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

2.3.5 Komite Audit Independen dan *Corporate Failure*

Komite audit diketuai oleh komisaris independen, dan anggotanya terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Pembentukan komite audit bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan.

Pada teori agensi, adanya komite audit dapat meminimalkan masalah keagenan, dimana dalam hal ini komite audit bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan perusahaan yang dapat mencerminkan tingkat penerapan *corporate governance* yang baik. Keberadaan komite audit akan menekan manajemen agar menghasilkan laporan keuangan yang baik tanpa adanya manipulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lakshan dan Wijekoon (2012) memberikan hasil bahwa keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Tidak adanya komite audit dalam perusahaan yang gagal, menekankan bahwa tidak ada mekanisme pengawasan untuk proses pelaporan keuangan perusahaan dan buruknya kredibilitas dari laporan keuangan auditan.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Komite audit independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

2.3.6 Ukuran Dewan Direksi dan *Corporate Failure*

Dewan direksi juga merupakan roda penggerak dalam operasional perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah anggota dalam susunan kepengurusan dewan direksi perusahaan dapat memengaruhi keefektifan peran dewan direksi dalam mengelola perusahaan (Lakshan dan Wijekoon. 2012). Pengaturan mengenai ukuran dewan direksi terdapat dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dimana jumlah minimal keanggotan dewan direksi yang disyaratkan dalam perusahaan yaitu minimal 2 (dua) orang.

Menurut Jensen (1993), suatu direksi setidaknya berisi sekitar tujuh hingga delapan orang sehingga dewan direksi bisa efektif dan dapat menjalankan peran pengendaliannya secara efisien, untuk peningkatan kinerja perusahaan. Di sisi lain, diekspektasikan juga bahwa perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang

lebih besar akan mengurangi kemungkinan untuk gagal karena akuntabilitas dari dewan direksi yang lebih baik (Lamberto dan Rath, 2008). Bukti lain yang mendukung pernyataan ini adalah hasil penelitian empiris oleh Chaganti *et al.* (1985), yang menemukan bahwa perusahaan *non-failed* memiliki ukuran dewan direksi yang lebih besar daripada perusahaan yang gagal.

Noorizkie (2013) dalam penelitiannya menguji hubungan antara mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan, memberikan hasil bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Suranta (2005) memberikan hasil bahwa ukuran dewan direksi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Lalu, Febrianto (2011) menguji efek mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memberikan hasil bahwa variabel ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan, membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sekaran, 2003). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *corporate failure*.

Pengukuran *corporate failure* menggunakan variabel dummy, yaitu nilai satu (1) untuk *failed companies* yaitu perusahaan mengalami defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih negatif (Lakshan dan Wijekoon, 2012) dan/atau mengalami *debt default* (Irfana, 2012) dalam satu periode pelaporan dan nilai nol (0) untuk *non-failed companies* yaitu perusahaan yang tidak mengalami defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih positif (Lakshan dan Wijekoon, 2012) dan/atau tidak mengalami *debt default* (Irfana, 2012) dalam satu periode pelaporan. *Failed companies* dan *non-failed companies* dikelompokkan berdasarkan sektor industri dan ukuran aset sama.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2003). Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdapat enam variabel independen

yang akan diuji terhadap kemungkinan terjadinya *corporate failure*. Variabel independen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris independen
- b. *Outside ownership*
- c. Opini audit
- d. Remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi
- e. Komite audit independen
- f. Ukuran dewan direksi

3.1.2.1 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Pengukuran variabel komisaris independen dalam penelitian ini yaitu melalui persentase atau proporsi jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan total keseluruhan anggota dewan komisaris perusahaan (Lakshan dan Wijekoon, 2012).

Melalui pengukuran tersebut dapat diketahui seberapa berpengaruh keberadaan komisaris independen terhadap efektifitas pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan. Sehingga, dapat diketahui proporsi komisaris independen yang sesuai agar tidak terjadi *corporate failure*.

3.1.2.2 *Outside Ownership*

Outside Ownership merupakan pembagian kepemilikan oleh bukan pengurus perusahaan atau bukan merupakan pihak internal dalam perusahaan. *Outside Ownership* terdiri dari kepemilikan kepemilikan institusional dan

kepemilikan publik. Variabel *outside ownership* dalam penelitian ini ditentukan dari persentase jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan publik (Lakhsan dan Wijekoon, 2012).

Indikator pengukuran *outside ownership* dapat memberikan makna proporsi jumlah saham yang dimiliki masing-masing oleh suatu institusi dan publik dalam perusahaan. Selain itu, dengan pengukuran tersebut dapat diketahui batas-batas minimal atau maksimal total kepemilikan saham pada perusahaan oleh pihak eksternal tersebut agar terhindar dari kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

3.1.2.3 Opini Audit

Opini audit wajar tanpa pengecualian adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Sedangkan yang termasuk opini audit modifikasi adalah opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan. Variabel opini audit dinyatakan dengan variabel dummy. Dimana nilai 1 untuk opini modifikasi dan 0 untuk *unqualified opinion* dan *unqualified opinion with explanatory language* (Lakhsan dan Wijekoon, 2012). Pengukuran tersebut berguna untuk mengetahui apakah opini modifikasi yang diberikan oleh auditor merupakan pertanda atau indikator terjadinya kegagalan dalam perusahaan.

3.1.2.4 Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Remunerasi adalah suatu kompensasi yang harus diberikan atas hasil kerja. Remunerasi bisa juga diartikan sebagai suatu imbalan, upah, atau gaji yang

biasanya berbentuk uang. Jadi remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi adalah suatu imbalan atas kinerjanya yang diberikan dalam bentuk uang. Pada penelitian ini, variabel remunerasi diukur berdasarkan rasio dari remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap besarnya beban usaha perusahaan (Lakshan dan Wijekoon, 2012). Dengan diketahuinya rasio antara remunerasi dengan total beban usaha, maka akan diketahui juga seberapa besar keefektifan dan keefisienan dari remunerasi tersebut terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, dapat diketahui juga jumlah remunerasi yang sesuai agar terhindar dari kemungkinan terjadinya *corporate failure*.

3.1.2.5 Komite Audit Independen

Definisi komite audit independen adalah komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dimana ia berasal dari luar perusahaan dan tidak boleh memiliki jabatan lain dalam struktur organisasi perusahaan yang sama. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel komite audit berdasarkan ketentuan Bapepam LK no. KEP-643/BL/2012 yang menyatakan bahwa komite audit independen paling kurang terdiri dari tiga orang anggota. Jumlah anggota komite audit independen dinyatakan dengan variabel dummy, dimana nilai 1 untuk jumlah anggota komite audit independen sama dengan atau kurang dari tiga orang dan nilai 0 untuk jumlah lebih dari tiga orang.

Indikator pengukuran variabel komite audit independen ini berguna untuk mengetahui tingkat pengawasan oleh pihak eksternal perusahaan. Jika perusahaan memiliki anggota komite audit independen lebih dari 3 orang maka

mekanisme pengawasan akan semakin baik. Keberadaan komite audit independen tersebut mampu menghindarkan perusahaan dari resiko kegagalan.

3.1.2.6 Ukuran Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Variabel ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah total direktur dalam susunan keanggotaan dewan direksi (Lakshan dan Wijekoon, 2013). Indikator pengukuran ukuran dewan direksi ini berguna untuk mengetahui jumlah personil yang sesuai dalam keanggotaan dewan direksi perusahaan agar terhindar dari *corporate failure*.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2012. Penentuan sampel menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2011-2012 untuk alasan keterbaruan dan merupakan perusahaan manufaktur.
2. Kategori *failed companies* yaitu perusahaan yang mengalami defisiensi modal dan/atau memiliki laba bersih negatif dan/atau mengalami *debt default* dalam satu periode pelaporan, sedangkan *non-failed companies* adalah perusahaan yang tidak mengalami defisiensi modal, memiliki laba positif, dan tidak mengalami *debt default* dalam satu periode

pelaporan. Perusahaan *failed companies* dan *non-failed companies* dikelompokkan berdasarkan industri yang sama serta memiliki ukuran aset yang sama.

3. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan yang berisi data lengkap mengenai *corporate governance*, yang merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2012 dalam situsnya www.idx.co.id dan tersedia di database Pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel untuk menjaga homogenitas data. Selain itu, sektor manufaktur merupakan sektor dominan di Asia, khususnya di Indonesia (Achmad *et al.*, 2009).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2012.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah metode regresi logistik (*logistic regression*). Penggunaan metode ini dikarenakan variabel dependen penelitian ini yaitu *corporate failure*, merupakan variabel dummy.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjabarkan karakteristik dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Pengujian ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2009).

3.5.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik (*logistic regression*). Model regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{CORP_FAIL} = \alpha + \beta_1 \text{OUT_DR} + \beta_2 \text{OUT_OWN} + \beta_3 \text{AUD_OP} + \beta_4 \text{REM_BM} + \beta_5 \text{AUCOM_IN} + \beta_6 \text{BO_SIZE} + e$$

Dimana :

α	= konstanta
CORP_FAIL	= kemungkinan terjadinya <i>corporate failure</i> (variabel dummy, nilai 1 untuk perusahaan gagal dan nilai 0 untuk perusahaan tidak gagal)
OUT_DR	= proporsi komisaris independen yang dibandingkan dengan total jumlah komisaris perusahaan
OUT_OWN	= kepemilikan saham pada perusahaan yang dihitung dari persentase kepemilikan saham oleh institusi dan publik)
AUD_OP	= opini audit (variabel dummy, nilai 0 untuk <i>unqualified opinion</i> dan <i>unqualified opinion with explanatory language</i> dan nilai 1 untuk opini modifikasi lainnya)

REM_BM	= remunerasi dewan komisaris diukur dari rasio jumlah remunerasi terhadap beban usaha perusahaan
AUCOM_IN	= jumlah anggota komite audit independen (variabel dummy, nilai 0 untuk jumlah >3 dan nilai 1 untuk jumlah ≤ 3)
BO_SIZE	= ukuran dewan direksi yang diukur dari total jumlah direktur dalam susunan dewan direksi perusahaan
e	= <i>error</i>

Tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam regresi logistik, yaitu :

a. Menilai Model Fit

1. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model*)

Hipotesis untuk menilai model fit adalah :

H₀ : model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Dari hipotesis tersebut, hipotesis nol tidak akan ditolak agar model fit dengan data. Statistik yang digunakan adalah berdasarkan pada fungsi *likelihood*. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}L$. Pada *output* SPSS memberikan dua nilai $-2\text{Log}L$, yang pertama yaitu model yang hanya memasukkan konstanta lalu yang kedua yaitu model dengan konstanta dan variabel bebas.

2. *Nagelkerke R Square*

Nagelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien *Cox* dan *Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Semakin mendekati nilai 0 maka model dianggap semakin tidak *goodness of fit* sementara semakin mendekati 1 maka model semakin *goodness of fit*.

3. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model yaitu dimana tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit.

Nilai statistik Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Tes harus lebih besar dari 0,5 dan berarti bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Tes Statistic sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol memang harus ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan observasinya sehingga model *goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.

b. Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel independen yaitu karakteristik *corporate governance* dengan

kemungkinan terjadinya *corporate failure*, yang dapat ditentukan menggunakan nilai probabilitas.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas kurang atau lebih kecil dari 0,05 atau 0,1 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Begitu pula sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 0,1 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.